



LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

**Kantor Bahasa Provinsi NTB
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2023**

**LAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SERTA TINDAK LANJUT
BENTURAN KEPENTINGAN**



**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan hasil Evaluasi dan Pemantauan Benturan Kepentingan di Kantor Bahasa Provinsi NTB Triwulan I Tahun 2023. Meskipun dalam pelaksanaan evaluasi dan pemantauan serta penyelesaian laporan ditemukan banyak kendala, semua itu dapat diatasi berkat kerja sama tim, arahan dari Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, dan dukungan rekan-rekan sejawat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan Evaluasi dan Pemantauan Benturan Kepentingan Triwulan I 2023 tidak akan terlaksana dan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan pelbagai pihak. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran dari pembaca agar laporan ini bisa lebih baik ke depannya.

Kami berusaha melakukan evaluasi dan Pemantauan terhadap berbagai bentuk pengaduan masyarakat dan pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam kaitannya dengan benturan kepentingan yang muncul di Kantor Bahasa Provinsi NTB, seperti gratifikasi, menyalahi wewenang jabatan, tindakan diskriminatif, dan menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Namun, hasil pemantauan dan evaluasi ini tentu saja masih tetap jauh panggang dari api, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik konstruktif untuk penyempurnaan kegiatan ini kami terima dengan senang hati.

Semoga laporan hasil Evaluasi dan Pemantauan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2023 ini bermanfaat untuk menghindari tindakan KKN di Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Mataram, 31 Maret 2023
Ketua Tim,



Gilang Aryo Damar

Daftar Isi

Prakata.....	i
Daftar Isi	ii
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum.....	2
3. Tujuan	2
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	2
5. Hasil Evaluasi.....	3
6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	3

1. Latar Belakang

Benturan kepentingan adalah situasi yang di dalamnya terdapat konflik kepentingan seseorang dengan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik dengan sengaja maupun tidak. Penyelewengan itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Bentuk benturan kepentingan terdiri atas berbagai macam, seperti (1) menggunakan barang milik negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan; (2) menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, (3) memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya; (4) bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum; (5) memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan, ataupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa; (6) kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi; (7) pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif; (8) pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya; (9) pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional; (10) melakukan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional; (10) melakukan komersialisasi pelayanan publik; serta (11) melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi.

Kantor Bahasa Provinsi NTB telah menetapkan juknis Benturan Kepentingan. Adanya juknis tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran dan keseragaman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pengawasan yang memenuhi standar sehingga dampaknya dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif, dan terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Sehubungan dengan itu, Tim Pengelola Benturan Kepentingan melakukan evaluasi dan pemantuan secara berkala setiap tiga bulan sekali terhadap berbagai bentuk tindakan pelanggaran atau benturan kepentingan yang ada di Kantor Bahasa Provinsi NTB. Evaluasi dan pemantauan pengelolaan benturan kepentingan oleh tim pada

kesempatan ini difokuskan untuk menelaah dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran atau benturan kepentingan yang terjadi di Kantor Bahasa Provinsi NTB selama periode Januari hingga Maret 2023.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
- c. Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- i. Juknis Penanganan Benturan Kepentingan Nomor 124/14.16/KP/2022 tahun 2022,
- j. Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Nomor: 0385/14.18/LK.06.00/2023 tentang Tim Pengelolaan Benturan Kepentingan Tahun 2023.

3. Tujuan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan benturan kepentingan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menumbuhkan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif, dan terbebas dari adanya benturan kepentingan.

4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi benturan kepentingan dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari hingga Maret tahun 2023 di Kantor Bahasa Provinsi

NTB. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola Benturan Kepentingan.

5. Hasil Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan benturan kepentingan di Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam kurun waktu bulan Januari hingga Maret tahun 2023 tergambar pada tabel berikut.

No.	Bulan	Nama Telapor	Nama Pelapor	Jenis Tindakan yang Dilaporkan	Tindak lanjut
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-

Hasil pemantauan dan evaluasi benturan kepentingan di Kantor Bahasa Provinsi NTB triwulan I tidak menemukan adanya kasus mengenai konflik benturan kepentingan.

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB akan terus ditingkatkan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan rutin demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Diharapkan Kantor Bahasa Provinsi NTB dapat mempertahankan dan memantau terjadinya konflik benturan kepentingan pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB demi terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Mengetahui,
Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum
NIP198103092006042002

Ketua Tim Penanganan
Benturan Kepentingan,

Gilang Aryo Damar, S.S.
NIP 199812192022031007